



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Maret 2024/Periodik - 2023)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF

**LEMBAGA** : BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH)

**UNIT KERJA** : BADAN PELAKSANA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : HARRY ALEXANDER
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 425719

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 14.400.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 165 m<sup>2</sup>/120 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA

TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 93 m<sup>2</sup>/120 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA  
BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 246 m<sup>2</sup>/90 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA  
BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 227 m<sup>2</sup>/120 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA  
TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

5. Tanah dan Bangunan Seluas 149 m<sup>2</sup>/60 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA  
TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

6. Tanah dan Bangunan Seluas 147 m<sup>2</sup>/21 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA  
TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

7. Tanah dan Bangunan Seluas 662 m<sup>2</sup>/140 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA  
BATU SANGKAR, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000

8. Tanah dan Bangunan Seluas 57 m<sup>2</sup>/57 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA  
TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000

9. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m<sup>2</sup>/180 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA  
TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000

10. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m<sup>2</sup>/203 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA  
BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.800.000.000

11. Tanah dan Bangunan Seluas 130 m<sup>2</sup>/80 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA



TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

12. Tanah dan Bangunan Seluas 133 m<sup>2</sup>/120 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA

JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000.000

<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	<b>Rp.</b>	<b>360.000.000</b>
---------------------------------------	------------	--------------------

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA Tahun 2016, HASIL SENDIRI

Rp. 150.000.000

2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp.  
2.000.000

3. MOBIL, TOYOTA RUSH Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.  
200.000.000

4. MOTOR, SUZUKI GSX S150 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.  
8.000.000

<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>5.000.000</b>
----------------------------------	------------	------------------

<b>D. SURAT BERHARGA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
--------------------------	------------	-------------

<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.132.250.000</b>
------------------------------	------------	----------------------

<b>F. HARTA LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>100.000.000</b>
-------------------------	------------	--------------------

<b>Sub Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>15.997.250.000</b>
------------------	------------	-----------------------

<b>III. HUTANG</b>	<b>Rp.</b>	<b>5.550.000.000</b>
--------------------	------------	----------------------

<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	<b>Rp.</b>	<b>10.447.250.000</b>
--	------------	-----------------------

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila di kemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.